

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI SOSIAL
PEREMPUAN DI DESA BENGKEL
KECAMATAN PERBAUNGAN**

SKRIPSI

OLEH

RIZKA CHAIRA FADHILLAH

228520010



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2026

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI SOSIAL
PEREMPUAN DI DESA BENGKEL
KECAMATAN PERBAUNGAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu politik
Universitas Medan Area

OLEH
RIZKA CHAIRA FADHILLAH
228520010

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Implementasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga dalam Meningkatkan Partisipasi Sosial
Perempuan di Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan

Nama : Rizka Chaira Fadhillah

NPM : 228520010

Program Studi : Administrasi Publik

Disetujui Oleh



Amas Mashudin, S.IP., M.AP
Pembimbing



Arief Lubis, S.Sos., M.I.P
Dekan



Adhika Nur Mada, M.AP
Ka. Prodi Administrasi Publik

Tanggal Lulus: 15 April 2026

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



1000
SEPULUH RIBU RUPIAH
METERA TEMPEL
C3E46ANX41376216
10200
n. 15 April 2026
Chaira Fadhillah
228520010

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Citivitasi Akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizka Chaira Fadhillah

Npm : 228520010

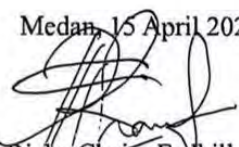
Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Implementasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Meningkatkan Partisipasi Sosial Perempuan di Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-an, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 15 April 2026


Rizka Chaira Fadhillah

ABSTRAK

Program PKK di Desa Bengkel memiliki sejumlah hambatan seperti kurangnya koordinasi antara pengurus PKK dan pemerintah desa, serta minimnya partisipasi perempuan desa dalam program PKK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam meningkatkan partisipasi sosial perempuan di Desa Bengkel, Kecamatan Perbaungan serta untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program PKK telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat peningkatan partisipasi sosial perempuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan mengacu pada model implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program PKK di Desa Bengkel belum berjalan optimal dan belum sepenuhnya mendorong keterlibatan perempuan dalam berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan, efektivitas program masih perlu ditingkatkan melalui indikator komunikasi seperti penguatan komunikasi yang lebih jelas dan inklusif, indikator sumber daya seperti peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya, indikator disposisi seperti penguatan motivasi dan kapasitas pelaksana, serta indikator struktur birokrasi seperti optimalisasi struktur birokrasi dan mekanisme koordinasi. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program PKK telah berjalan namun belum sepenuhnya optimal dalam mendorong partisipasi sosial perempuan secara merata, aktif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi, PKK, Partisipasi Sosial Perempuan

ABSTRACT

The PKK program in Bengkel Village faces several challenges, such as a lack of coordination between PKK administrators and the village government, as well as low participation of village women in PKK activities. This study aims to analyze the implementation of the Family Welfare Empowerment (PKK) Program in increasing women's social participation in Bengkel Village, Perbaungan District, and to examine the extent to which the program has been carried out in accordance with its intended objectives, along with the supporting and inhibiting factors affecting women's social participation. This research employs a descriptive qualitative method, with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The data analysis technique is conducted qualitatively through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The theoretical framework used refers to the policy implementation model of George C. Edward III, which consists of four variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of the study indicate that the implementation of the PKK Program in Bengkel Village has not been optimal and has not fully encouraged women's involvement in various social activities within the community. The effectiveness of the program still needs to be improved through several indicators: communication, by strengthening clearer and more inclusive communication; resources, by improving both the quality and quantity of resources; disposition, by enhancing the motivation and capacity of implementers; and bureaucratic structure, by optimizing organizational structure and coordination mechanisms. In conclusion, the implementation of the PKK Program has been carried out but has not yet been fully optimal in encouraging women's social participation in an equitable, active, and sustainable manner.

Keywords: Implementation, PKK, Women's Social Participation

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

1. Nama : Rizka Chaira Fadhillah
2. Alamat : Dusun III Desa Bengkel
3. Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Pakam, 16 Mei 2004
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Status Pernikahan : Belum Menikah
7. Warga Negara : Indonesia
8. Nomor Telepon/HP : 083826220481
9. E-mail : rizkachaira9@gmail.com
10. Kode Pos : 20986

PENDIDIKAN FORMAL

- 2012-2013 : RA Dar El Rahmah
- 2013-2018 : SD Negeri 108293 Perbaungan
- 2018-2020 : SMP Negeri 1 Perbaungan
- 2020-2022 : SMK Nusantara Angkasa Maritim
- 2022-Sekarang : Universitas Medan Area
- Jurusan : Administrasi Publik

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, penyertaan dan kekuatan yang telah diberikan sehingga penulisan skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik, izinkanlah saya mempersembahkan karya sederhana ini sebagai ungkapan terima kasih yang tulus dan penuh cinta kepada:

1. Teristimewa, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Achmad Chair dan Ibu Raudatul Husna, dua sosok yang paling berjasa dalam kehidupan penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan dan ketulusan yang diberikan, semoga papa dan umi selalu bangga karena telah berhasil menjadikan anak perempuan pertamanya ini menyandang gelar sarjana seperti yang diharapkan. Besar harapan penulis semoga papa dan umi selalu sehat, panjang umur, banyak rezeki, dan bisa menyaksikan keberhasilan lain anak perempuannya di masa yang akan datang.
2. Adik laki-laki penulis, Muhammad Fachriy Ikhwan yang selalu membuat penulis termotivasi untuk bisa terus belajar dan menjadi lebih baik sebagai seorang kakak sehingga dapat memberikan pengaruh yang baik dan semoga selalu tumbuh menjadi pribadi yang baik. Seperti lirik lagu Nina-Feast “*Tumbuh lebih baik, cari panggilanmu. Jadi lebih baik, dibanding diriku*”.
3. Terima kasih penulis ucapkan kepada keluarga besar H. Ust Abdul Rasyid dan keluarga besar Eri Ikhwan atas segala doa dan dukungan yang telah diberikan selama proses perkuliahan.

4. Penulis mengucapkan beribu terima kasih kepada sahabat penulis yaitu *DEFRIST* alias Devi Nabina Br Sinulingga, Firos Syoffita, Salika Khanum Hidayat dan Tri Mustika Situmorang. Terima kasih telah berteman dengan penulis, menjadi rumah berkumpul yang hangat, kompak, menyenangkan, serta menerima segala kekurangan dan kelebihan dari penulis yang sering kalian panggil adik kecil. Suka dan duka telah kita lalui bersama dalam proses perkuliahan dan pendewasaan diri, semoga ke depannya sukses terus dan bahagia selalu. Meskipun setelah ini akan menjalani kehidupan yang berbeda, semoga pertemanan ini selalu terjaga selamanya.
5. Terakhir, terima kasih kepada diri saya sendiri. Terima kasih atas perjalanan panjang yang telah dilalui hingga bisa sampai dititik ini, apresiasi sebesar-besarnya karena telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sampai detik ini, penulis bangga untuk setiap langkah kecil yang sudah dilewatkan, selamat berpetualang dilevel kehidupan selanjutnya, tidak ada yang lebih indah dari menyaksikan proses dan pertumbuhan diri sendiri. *“Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah (Q.S Al Ghafir:44).* Salah satu motto hidup yang penulis ingat yaitu *“Setiap orang mempunyai rute hidupnya masing-masing, kamu tidak tertinggal oleh siapapun, dan kamu tidak mendahului siapapun”*. Akhir kata *“The purpose of our live is to be happy”*.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan nikmat dan rahmat karunianya sehingga dengan izin dan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Implementasi Program Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan Di Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan”. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Yurial Arief Lubis, S.Sos, M.IP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Drs. Indra Muda, M.AP selaku Ketua Prodi Administrasi Publik Universitas Medan Area dan sebagai Sekretaris yang telah memberikan saran serta masukan yang sangat bermanfaat.
4. Bapak Amas Mashudin, S.IP., M.AP selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dan memberikan arahan selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si selaku Ketua yang telah memberikan kritik dan saran bagi penulis.
6. Bapak Beltahmamero Simamora, S.IP., MPA selaku Penguji yang telah memberikan kritik, masukan dan saran agar skripsi ini terselesaikan dengan baik.

7. Bapak dan Ibu dosen serta staf pegawai jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik karena telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi tambahan pengetahuan bagi siapa saja yang membutuhkannya. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Medan, 15 April 2026

Rizka Chaira Fadhillah



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
 I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis	8
 II TINJAUAN PUSTAKA	 9
2.1 Kebijakan Publik	9
2.2 Implementasi Kebijakan Publik.....	10
2.3 Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik	11
2.4 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	20
2.5 Partisipasi Sosial Perempuan	24
2.6 Penelitian Terdahulu	27
2.7 Kerangka Pemikiran	30
 III METODE PENELITIAN	 32
3.1 Jenis Penelitian	32
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	34
3.2.1 Lokasi Penelitian.....	34
3.2.2 Waktu Penelitian	34
3.3 Informan Penelitian	34
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.5 Teknik Analisis Data	41
 IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 43
4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian	43
4.1.1 Gambaran Umum Desa Bengkel.....	43
4.1.2 Kondisi Geografis Desa Bengkel.....	44
4.1.3 Visi dan Misi Desa Bengkel.....	45
4.1.4 Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Bengkel	47
4.2 Hasil Penelitian	50
4.3 Pembahasan	89
4.3.1 Implementasi program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam meningkatkan partisipasi sosial perempuan di Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan.....	89
4.3.2 Faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi implementasi program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam	

Perbaungan.....	107
V KESIMPULAN DAN SARAN.....	114
5.1 Simpulan.....	114
5.2 Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA.....	119



DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Penelitian Terdahulu.....	29
2. Waktu Penelitian.....	37
3. Informan Penelitian.....	40



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Kerangka Berfikir	34
2. Struktur Organisasi Desa Bengkel.....	44
3. Struktur Kepengurusan PKK Desa Bengkel	47
4. Wawancara Bersama Kepala Desa.....	130
5. Wawancara Bersama Ketua Tim Penggerak PKK.....	130
6. Wawancara Bersama Ketua Kelompok Kerja (Pokja) PKK.....	131
7. Wawancara Bersama Anggota Aktif PKK.....	131
8. Wawancara Bersama Masyarakat	131



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan sosial di Indonesia. Dalam konteks pembangunan nasional, perempuan tidak hanya dipandang sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang memiliki peran aktif dalam menentukan arah kemajuan masyarakat. Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan telah menekankan pentingnya kesetaraan gender dan peningkatan kapasitas perempuan di berbagai bidang kehidupan. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) nomor 5 tentang kesetaraan gender, yang menekankan peningkatan partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial serta tercermin dalam berbagai peraturan dan program, seperti pengarusutamaan gender, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta peningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan sosial dan politik. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan gender, di mana perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam berperan serta membangun kesejahteraan keluarga dan komunitas (Hasyim & Makruf, 2022:46-52).

Wadah yang berperan strategis dalam mendukung upaya tersebut salah satunya yaitu Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). PKK merupakan gerakan nasional yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan perempuan. Program ini memiliki struktur organisasi yang menjangkau hingga tingkat desa dan kelurahan, sehingga mampu menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan berbagai

kegiatan sosial kemasyarakatan. Fokus utama PKK mencakup berbagai bidang, seperti pendidikan dan keterampilan, kesehatan keluarga, ketahanan pangan, lingkungan hidup, hingga ekonomi produktif keluarga. Melalui kegiatan tersebut, PKK tidak hanya berperan dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga, tetapi juga dalam membangun kesadaran sosial dan semangat gotong royong di masyarakat. Peran PKK menjadi sangat penting dalam konteks peningkatan partisipasi sosial perempuan. Melalui program-programnya, perempuan didorong untuk lebih aktif terlibat dalam kegiatan sosial, baik sebagai pelaksana maupun sebagai penggerak masyarakat (Arma, 2016:48).

Upaya tersebut di dukung pemerintah dengan menetapkan dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Peraturan ini menjadi pedoman nasional dalam pelaksanaan kegiatan PKK di seluruh jenjang pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Di dalamnya dijelaskan bahwa PKK merupakan mitra kerja pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan, partisipasi, serta kualitas hidup masyarakat. Melalui peraturan ini, PKK diarahkan untuk menjalankan 10 Program Pokok PKK, yang meliputi bidang penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, serta perencanaan sehat keluarga.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ini menegaskan pentingnya sinergi antara tim penggerak PKK dengan pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memberikan fasilitasi, pembinaan, pendanaan, serta sarana dan prasarana agar kegiatan PKK dapat berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan. Permendagri Nomor 36 Tahun 2020 juga menekankan perlunya monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap setiap program, sehingga hasil kegiatan dapat diukur dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan keluarga.

Kabupaten Serdang Bedagai menjadi salah satu yang menarik perhatian sebagai wilayah dengan potensi signifikan dalam pengembangan masyarakat melalui partisipasi aktif perempuan. Daerah ini dikenal sebagai kawasan agraris dengan sumber daya manusia yang substansial, khususnya perempuan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi domestik, pertanian, dan usaha mikro. Pemerintah daerah telah memberikan dukungan terhadap implementasi Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) di berbagai lokasi sebagai mekanisme untuk memperkuat peran perempuan dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Melalui inisiatif PKK, diharapkan perempuan tidak hanya berfungsi sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang mampu mendorong dan memimpin transformasi sosial di komunitasnya. Meskipun demikian, tidak semua wilayah mencapai tingkat keberhasilan yang seragam dalam pelaksanaan program PKK. Beberapa desa mengalami kendala dalam hal partisipasi aktif anggota, lemahnya koordinasi antar bidang, serta kurangnya inovasi dalam kegiatan yang mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan keluarga (Damanik et al., 2024:4957-4963).

Kondisi tersebut juga terlihat di Desa Bengkel, Kecamatan Perbaungan, yang merupakan salah satu desa dengan struktur sosial dan ekonomi yang cukup beragam. Desa Bengkel memiliki potensi ekonomi yang baik karena lokasinya yang strategis dan masyarakatnya yang sebagian besar bekerja di sektor perdagangan, jasa, serta usaha kecil dan menengah. Secara sosial, masyarakat Desa Bengkel cukup heterogen, dengan perpaduan antara budaya tradisional dan gaya hidup modern yang berkembang seiring meningkatnya aktivitas ekonomi. Potensi ini seharusnya dapat menjadi kekuatan bagi perempuan untuk berperan aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan pemberdayaan melalui PKK. Namun kenyataannya, tingkat partisipasi sosial perempuan dalam kegiatan PKK masih tergolong rendah. Banyak kegiatan PKK yang belum berjalan secara optimal, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi.

Masalah yang sering muncul adalah kurangnya koordinasi antara pengurus PKK dan pemerintah desa, sehingga program kerja yang disusun tidak selalu selaras dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peran perempuan dalam pembangunan sosial menyebabkan kegiatan PKK belum mendapatkan dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat. Sebagian besar perempuan masih memandang keterlibatan dalam PKK sebatas kewajiban administratif atau kegiatan tambahan, bukan sebagai wadah aktualisasi diri dan peningkatan kapasitas sosial. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia, terutama dalam hal kemampuan manajerial, perencanaan program, dan pemanfaatan teknologi informasi, juga menjadi penghambat keberhasilan pelaksanaan kegiatan PKK di Desa Bengkel. Akibatnya, peran PKK sebagai wadah pemberdayaan perempuan belum mampu secara signifikan meningkatkan

kesadaran dan partisipasi sosial perempuan dalam pembangunan desa. Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal PKK sebagai penggerak partisipasi sosial perempuan dengan realitas pelaksanaannya.

Permasalahan pemberdayaan perempuan di Desa Bengkel juga terlihat dari masih terbatasnya akses perempuan terhadap kegiatan pelatihan dan pengembangan keterampilan yang berkelanjutan melalui PKK. Meskipun terdapat beberapa program pelatihan seperti kerajinan tangan atau usaha kecil, kegiatan tersebut sering kali bersifat sementara dan tidak diikuti dengan pendampingan lanjutan. Akibatnya, keterampilan yang diperoleh tidak berkembang menjadi usaha produktif yang mampu meningkatkan pendapatan keluarga. Selain itu, kurangnya akses terhadap informasi pasar, permodalan, serta pemanfaatan teknologi digital membuat perempuan di Desa Bengkel kesulitan untuk bersaing dan mengembangkan usaha secara mandiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan belum menyentuh aspek kemandirian ekonomi secara optimal.

Peran perempuan dalam pengambilan keputusan baik di tingkat keluarga maupun masyarakat juga masih relatif terbatas. Banyak perempuan yang belum terlibat secara aktif dalam musyawarah desa atau forum-forum penting lainnya, sehingga aspirasi dan kebutuhan mereka belum sepenuhnya terakomodasi dalam perencanaan pembangunan desa. Hal ini diperparah oleh adanya budaya sosial yang masih menempatkan perempuan pada peran domestik, sehingga ruang partisipasi publik menjadi terbatas. Program-program pemberdayaan yang dijalankan melalui PKK belum sepenuhnya mampu meningkatkan kapasitas perempuan sebagai agen perubahan sosial.

Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk dilakukan penelitian mendalam mengenai implementasi program PKK di Desa Bengkel. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang dinamika sosial yang terjadi dalam pelaksanaan PKK di tingkat desa. Hasil penelitian ini tidak hanya akan memberikan pemahaman akademis mengenai efektivitas pelaksanaan PKK, tetapi juga dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan dan strategi pemberdayaan perempuan yang lebih relevan dan kontekstual di Desa Bengkel dan daerah sekitarnya. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi tinggi untuk dilakukan karena dapat menjembatani kesenjangan antara idealisme program nasional PKK dengan realitas implementasinya.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Meningkatkan Partisipasi Sosial Perempuan di Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam meningkatkan partisipasi sosial perempuan di Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi implementasi program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam meningkatkan partisipasi sosial perempuan di Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah di uraikan di atas, tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam meningkatkan partisipasi sosial perempuan di Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi implementasi program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam meningkatkan partisipasi sosial perempuan di Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini tentang implementasi PKK dalam meningkatkan partisipasi sosial perempuan di Desa Bengkel, Kecamatan Perbaungan, memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori pembangunan sosial dan feminisme. Dalam konteks teori feminisme, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana program PKK dapat menjadi alat transformasi sosial yang efektif. Melalui analisis empiris di tingkat desa, penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam kegiatan sosial tidak hanya dipengaruhi oleh akses sumber daya, tetapi juga oleh dinamika budaya lokal yang sering kali membatasi peran gender. Dengan demikian, temuan ini berkontribusi pada literatur pembangunan pedesaan di Indonesia, memberikan model teoritis baru untuk mengintegrasikan program nasional seperti PKK ke dalam kerangka teori global

tentang kesetaraan gender, sehingga mendorong peneliti masa depan untuk mengeksplorasi interaksi antara kebijakan publik dan perubahan sosial di konteks spesifik seperti desa-desa terpencil.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini memberikan wawasan dan pengarahan yang dapat langsung diterapkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Desa Bengkel. Bagi perempuan di desa, temuan tentang implementasi program PKK dalam mendorong partisipasi sosial seperti keterlibatan dalam kegiatan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan sehingga mereka dapat lebih aktif dalam pengambilan keputusan keluarga dan komunitas, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan psikologis mereka. Secara keseluruhan, manfaat praktis ini tidak hanya memperkuat partisipasi sosial perempuan tetapi juga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal, mengurangi kesenjangan gender dan meningkatkan ketahanan komunitas terhadap tantangan sosial-ekonomi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan konsep fundamental dalam ilmu administrasi dan pemerintahan yang menggambarkan serangkaian keputusan, tindakan, dan program yang dirancang oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan. Kebijakan publik tidak hanya dipahami sebagai hasil akhir berupa keputusan pemerintah, tetapi juga sebagai suatu proses dinamis yang melibatkan perumusan masalah, penentuan prioritas, pelaksanaan, hingga evaluasi hasil kebijakan (Ridwan & Sudrajat, 2020:45-46).

Menurut William N. Dunn (2018:50) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu pola keputusan yang saling berkaitan yang dibuat oleh badan-badan pemerintah dan pejabat publik yang berkaitan dengan tujuan tertentu. Dunn menekankan bahwa kebijakan publik bersifat multidimensional karena melibatkan berbagai aktor, baik dari sektor pemerintahan, swasta, maupun masyarakat sipil, serta menuntut koordinasi lintas lembaga dalam pelaksanaannya. Sedangkan Menurut Anderson (2006:5), kebijakan publik memiliki beberapa karakteristik penting:

1. Dibuat oleh badan pemerintah, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.
2. Bersifat berorientasi pada tujuan, yaitu untuk menyelesaikan masalah publik.
3. Melibatkan keputusan kolektif dan mengikat, karena berimplikasi bagi masyarakat luas.
4. Dilaksanakan dan dievaluasi melalui proses yang berkelanjutan.

Dengan demikian, kebijakan publik bukan hanya produk keputusan administratif, tetapi juga manifestasi dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan pemerintah. Proses pembuatannya mencerminkan interaksi antara kepentingan publik, kekuasaan politik, dan kapasitas birokrasi untuk melaksanakan kebijakan secara efektif. Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan partisipatif. Kebijakan publik menjadi instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tercantum dalam tujuan negara pada Pembukaan Undang - Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, setiap kebijakan publik idealnya dirumuskan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan sosial. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian keputusan dan tindakan strategis yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan publik dan mewujudkan tujuan bersama melalui proses yang sistematis, partisipatif, dan berorientasi pada hasil (Suaib et al., 2022:15).

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam siklus kebijakan publik karena pada tahap inilah keputusan politik yang telah dirumuskan diwujudkan menjadi tindakan nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat. Implementasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan administratif, tetapi juga mencakup proses penyesuaian, koordinasi, dan interpretasi kebijakan agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Van Meter dan Van Horn (2008:146-147), implementasi kebijakan adalah tindakan- tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok pemerintah maupun

swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Definisi ini menegaskan bahwa implementasi bukan sekadar kegiatan rutin administratif, melainkan suatu proses dinamis yang melibatkan interaksi antar aktor dan sumber daya dalam konteks sosial dan politik tertentu. Mereka menekankan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh sejauh mana komunikasi, sumber daya, dan kondisi lingkungan mendukung pencapaian tujuan kebijakan.

Dalam konteks administrasi publik, implementasi kebijakan juga dapat dipahami sebagai proses manajerial dan politik. Dari sisi manajerial, implementasi menuntut kemampuan birokrasi dalam mengalokasikan sumber daya, menyusun prosedur, dan mengontrol pelaksanaan kebijakan agar sesuai dengan rencana. Dari sisi politik, implementasi mencerminkan kemampuan pemerintah untuk membangun legitimasi, dukungan, dan partisipasi masyarakat agar kebijakan dapat berjalan efektif. Dengan demikian, implementasi kebijakan merupakan proses penerjemahan keputusan politik ke dalam tindakan konkret melalui koordinasi, komunikasi, dan pemanfaatan sumber daya yang melibatkan berbagai aktor dan institusi dengan tujuan mencapai hasil kebijakan yang diharapkan oleh publik. Keberhasilan implementasi menjadi indikator sejauh mana kebijakan publik mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, menjembatani kesenjangan antara rumusan kebijakan dengan realitas di lapangan (Nugroho, 2023:40).

2.3 Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan yang telah dirumuskan, tetapi juga oleh faktor-faktor yang memengaruhi bagaimana kebijakan tersebut dijalankan di lapangan. Salah satu model yang paling

banyak digunakan dalam studi implementasi kebijakan adalah model George C. Edward III dalam Agustino (2020:154-158). Model ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini bersifat saling berkaitan dan menentukan efektivitas penerapan suatu kebijakan publik.

1. Komunikasi (*Communication*)

Faktor komunikasi merujuk pada bagaimana kebijakan disampaikan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana di lapangan (*implementors*). Komunikasi yang baik memungkinkan para pelaksana memahami dengan jelas apa tujuan, isi, dan prosedur dari kebijakan yang akan dijalankan. Menurut Edward III, keberhasilan implementasi sangat tergantung pada kejelasan (*clarity*), konsistensi (*consistency*), dan transmisi (*transmission*) informasi yang disampaikan yaitu:

- a. Kejelasan (*clarity*) dalam komunikasi kebijakan merupakan faktor yang sangat penting karena berperan langsung dalam menentukan sejauh mana pelaksana memahami maksud dan tujuan dari kebijakan yang diterapkan. Informasi yang jelas memungkinkan setiap pihak yang terlibat memiliki persepsi yang sama terhadap apa yang harus dicapai, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana langkah-langkah pelaksanaan harus dilakukan.
- b. Konsistensi (*consistency*) dalam komunikasi kebijakan memiliki peran penting untuk menjaga keselarasan pemahaman dan tindakan antara pembuat kebijakan, pelaksana, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam

proses implementasi. Konsistensi berarti bahwa setiap pesan, arahan, atau instruksi yang disampaikan harus bersifat selaras, tidak bertentangan, dan tetap sama meskipun disampaikan oleh pihak yang berbeda atau pada waktu yang berbeda.

- c. Transmisi (*transmission*) merupakan aspek yang sangat krusial dalam proses komunikasi kebijakan karena menyangkut bagaimana pesan, instruksi, dan tujuan kebijakan disampaikan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana (*implementors*) di berbagai tingkatan birokrasi. Transmisi bukan sekadar soal penyampaian informasi, tetapi juga tentang memastikan bahwa informasi tersebut benar-benar sampai kepada pihak yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dalam bentuk yang dapat dipahami serta diterapkan secara praktis.

Proses transmisi yang efektif memerlukan saluran komunikasi yang jelas, terbuka, dan terkoordinasi dengan baik. Saluran ini dapat berupa komunikasi formal seperti surat edaran, peraturan tertulis, rapat koordinasi, dan pelatihan teknis, maupun komunikasi informal seperti diskusi antar lembaga atau konsultasi langsung. Semakin efektif saluran komunikasi yang digunakan, semakin besar peluang informasi kebijakan diterima secara utuh tanpa distorsi makna. Sebaliknya, jika transmisi terganggu oleh birokrasi yang berbelit, struktur organisasi yang terlalu hierarkis, atau minimnya teknologi komunikasi, maka pesan kebijakan bisa mengalami distorsi, penundaan, atau bahkan hilang di tengah proses penyampaian.

2. Sumber Daya (*Resources*)

Faktor kedua yang berpengaruh besar terhadap implementasi kebijakan adalah ketersediaan sumber daya yang memadai. Kebijakan publik yang dirancang dengan baik tidak akan berjalan efektif apabila pelaksanaannya kekurangan tenaga terampil, dana operasional terbatas, atau fasilitas kerja tidak memadai. Sumber daya di sini mencakup sumber daya manusia (SDM), keuangan, sarana-prasarana yaitu:

- a. Sumber daya manusia (SDM) merupakan komponen yang paling menentukan dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik karena merekalah yang secara langsung menerjemahkan kebijakan dari tataran konsep menjadi tindakan nyata di lapangan. Tanpa SDM yang kompeten, kebijakan yang telah dirumuskan dengan baik tidak akan memberikan hasil yang optimal. Oleh karena itu, kualitas, kuantitas, serta motivasi para pelaksana menjadi faktor penentu utama dalam efektivitas implementasi kebijakan. Secara keseluruhan, SDM bukan hanya pelaksana kebijakan, tetapi juga menjadi penggerak utama yang menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan. Tanpa SDM yang kompeten, bermotivasi, dan berintegritas tinggi, kebijakan publik tidak akan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
- b. Sumber daya keuangan merupakan salah satu elemen paling krusial dalam proses implementasi kebijakan publik karena setiap kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan memerlukan dukungan dana yang memadai. Tanpa adanya anggaran yang cukup, kebijakan yang telah dirancang dengan matang hanya akan menjadi dokumen administratif tanpa

dampak nyata di lapangan. Oleh karena itu, keuangan berfungsi sebagai “bahan bakar” yang memungkinkan seluruh komponen kebijakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan.

Ketersediaan dana menentukan sejauh mana kebijakan dapat dijalankan secara menyeluruh. Anggaran yang cukup memungkinkan pelaksanaan kegiatan operasional seperti sosialisasi kebijakan, pelatihan aparatur, koordinasi antar instansi, pengadaan fasilitas, serta pemantauan dan evaluasi hasil kebijakan. Sebaliknya, jika dana yang dialokasikan terlalu kecil atau tidak proporsional, maka berbagai kegiatan penting tersebut akan terhambat. Misalnya, kebijakan tentang peningkatan pelayanan publik tidak akan efektif jika tidak tersedia dana untuk pelatihan pegawai, perbaikan sarana, atau pembaruan sistem pelayanan digital.

- c. Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung yang sangat penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik, karena keduanya berfungsi sebagai alat dan wadah yang memungkinkan kegiatan di lapangan dapat berjalan dengan lancar, efisien, dan sesuai rencana. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai, pelaksana kebijakan akan menghadapi berbagai kendala teknis dan operasional yang dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan.

Sarana dapat diartikan sebagai segala bentuk alat atau perlengkapan yang secara langsung digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas, seperti peralatan kantor, komputer, kendaraan operasional, perangkat teknologi informasi, serta bahan atau alat bantu kerja lainnya. Sementara itu,

prasarana mencakup fasilitas dasar atau infrastruktur yang menjadi tempat dan pendukung berlangsungnya kegiatan, seperti gedung perkantoran, jalan, jaringan listrik, air bersih, sistem komunikasi, dan transportasi.

3. Disposisi atau Sikap Pelaksana (*Dispositions of Implementors*)

Disposisi atau sikap pelaksana mencerminkan komitmen, motivasi, dan orientasi nilai dari pihak yang menjalankan kebijakan. Edward III menekankan bahwa meskipun kebijakan telah dikomunikasikan dengan baik dan didukung sumber daya yang cukup, keberhasilan implementasi tetap bergantung pada kemauan pelaksana untuk menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Disposisi yang positif, seperti komitmen terhadap pelayanan publik dan kepedulian terhadap tujuan kebijakan, akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan. Pada disposisi komitmen, motivasi, dan orientasi nilai dari pihak yang menjalankan kebijakan yaitu:

- a. Komitmen terhadap tujuan kebijakan merupakan faktor fundamental yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik. Komitmen ini tidak hanya mencerminkan tekad individu pelaksana dalam melaksanakan tugas, tetapi juga menggambarkan keselarasan antara nilai pribadi, visi organisasi, dan tujuan kebijakan yang ingin dicapai. Seorang pelaksana yang memiliki komitmen tinggi akan menunjukkan loyalitas terhadap misi kebijakan, bekerja dengan penuh integritas, serta menjaga konsistensi dalam menjalankan peran meskipun menghadapi tekanan, perubahan lingkungan, atau keterbatasan sumber daya.
- b. Motivasi yang kuat membuat pelaksana berorientasi pada kinerja dan hasil (*performance-driven*). Mereka akan proaktif mencari solusi terhadap

hambatan, memperbaiki prosedur kerja yang tidak efisien, serta mengembangkan inovasi yang dapat meningkatkan efektivitas kebijakan. Selain itu, motivasi juga mendorong pelaksana untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, baik yang bersifat administratif, sosial, maupun teknologi.

Sikap ini sangat penting dalam menghadapi dinamika kebijakan publik yang kompleks dan terus berkembang. Motivasi pelaksana dapat bersumber dari dua dimensi utama yaitu internal dan eksternal. Faktor internal mencakup kepuasan batin atas hasil kerja, rasa tanggung jawab moral terhadap masyarakat, kebanggaan profesional, serta nilai-nilai pribadi yang selaras dengan tujuan kebijakan. Sementara itu, faktor eksternal meliputi dukungan organisasi, kepemimpinan yang inspiratif, sistem penghargaan dan insentif, serta lingkungan kerja yang kondusif. Sinergi antara kedua faktor ini menciptakan dorongan yang berkesinambungan bagi pelaksana untuk berprestasi.

- c. Orientasi mencerminkan sejauh mana pelaksana kebijakan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai fokus utama dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Orientasi ini tidak hanya menyangkut sikap moral atau etika kerja, tetapi juga mencerminkan kesadaran profesional bahwa tujuan utama kebijakan publik adalah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Pelaksana dengan orientasi nilai yang kuat memahami bahwa kebijakan bukan sekadar instrumen administratif, melainkan wujud tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kemaslahatan bersama.

Pelaksana yang memiliki orientasi nilai positif akan menunjukkan perilaku yang berlandaskan pada integritas, kejujuran, empati, dan keadilan. Mereka berusaha memberikan pelayanan dengan cara yang transparan, responsif, dan bebas dari kepentingan pribadi atau golongan. Sikap ini menumbuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah dan memperkuat legitimasi kebijakan yang dijalankan. Dengan kata lain, orientasi nilai terhadap pelayanan publik menjadi cerminan dari etos kerja birokrasi yang berkarakter humanis dan akuntabel.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur birokrasi merupakan wadah organisasi tempat kebijakan dilaksanakan. Edward III menilai bahwa struktur birokrasi yang efisien, fleksibel, dan memiliki mekanisme koordinasi yang baik akan memperlancar pelaksanaan kebijakan. Sebaliknya, birokrasi yang terlalu hierarkis, berbelit-belit, atau tidak responsif terhadap perubahan dapat menjadi penghambat. Struktur birokrasi yang efisien, fleksibel, dan memiliki mekanisme koordinasi yang baik akan memperlancar pelaksanaan kebijakan yaitu:

- a. Efisiensi dalam birokrasi merupakan salah satu indikator utama keberhasilan implementasi kebijakan publik karena mencerminkan sejauh mana lembaga pemerintah mampu mencapai tujuan dengan penggunaan sumber daya yang minimal namun hasil yang optimal. Efisiensi tidak hanya berarti penghematan waktu dan biaya, tetapi juga mencakup pengelolaan sumber daya manusia, sistem kerja, serta pemanfaatan teknologi secara cerdas dan produktif. Birokrasi yang efisien mampu menyeimbangkan antara prosedur administratif dan kebutuhan lapangan, sehingga proses

pelayanan publik dapat berjalan cepat, tepat, dan tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- b. Fleksibilitas dalam birokrasi mencerminkan kemampuan suatu organisasi pemerintahan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan, perubahan kebijakan, serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dalam konteks implementasi kebijakan publik, fleksibilitas berarti birokrasi tidak terikat secara kaku pada aturan atau prosedur yang formalistis, tetapi memiliki keluwesan dalam menafsirkan dan menerapkan kebijakan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Fleksibilitas memungkinkan birokrasi untuk tetap berjalan efektif meskipun menghadapi tantangan yang tidak terduga, seperti perubahan prioritas pemerintah, krisis sosial, atau keterbatasan sumber daya.
- c. Mekanisme koordinasi yang baik merupakan salah satu pilar utama keberhasilan birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Koordinasi tidak hanya berarti pembagian informasi antar unit kerja, tetapi juga mencakup penyelarasan visi, tujuan, dan tindakan di seluruh tingkatan organisasi. Dalam birokrasi yang kompleks, di mana berbagai instansi dan unit memiliki fungsi yang saling berkaitan, koordinasi menjadi alat penting untuk mencegah duplikasi pekerjaan, menghindari konflik kewenangan, serta memastikan bahwa setiap bagian bekerja menuju arah yang sama. Koordinasi yang baik membuat pelaksanaan kebijakan berjalan lebih efisien, harmonis, dan tepat sasaran.

2.4 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan salah satu bentuk kebijakan sosial berbasis masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui partisipasi aktif masyarakat, khususnya perempuan. PKK lahir dari semangat gotong royong dan partisipasi sosial yang menjadi ciri khas pembangunan nasional Indonesia. PKK berfungsi sebagai wadah strategis dalam mengembangkan potensi keluarga agar mampu hidup mandiri, sejahtera, dan berdaya saing (Hanis & Marzaman, 2020:123-135).

PKK memiliki 10 program pokok, yaitu penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkeoperasi, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat. Sepuluh program pokok ini menggambarkan ruang lingkup kerja PKK yang komprehensif dalam membangun kapasitas keluarga baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun spiritual (Utami, 2022:25-31). Berikut 10 Program Pokok PKK diimplementasikan melalui empat Kelompok Kerja (Pokja) dengan berbagai kegiatan yang terperinci:

1. Pokja I: Penghayatan dan Pengamalan Pancasila serta Gotong Royong

Pokja I berfokus pada pembangunan karakter dan solidaritas sosial. Dalam aspek Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, kegiatan yang dilakukan mencakup penyuluhan Undang-undang Perkawinan, ceramah kesadaran hukum, upaya penanggulangan kenakalan remaja dan narkoba (bekerja sama dengan instansi terkait), pembentukan dan pembinaan kelompok Majelis Taklim, serta penyuluhan Panca Dharma Wanita. Selain itu, Pokja I juga membina berbagai kelompok seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina

Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lanjut Usia (BKL), serta mengadakan simulasi tentang gender.

Sementara itu, program Gotong Royong dijalankan melalui partisipasi dalam Lomba K-3 (Kebersihan, Keindahan, Ketertiban), pelaksanaan kerja bakti rutin seperti "Sabtu Bersih" (Sabsih), pengadaan kegiatan arisan, jimpitan, dan rukun kematian. Pokja ini juga memonitor kegiatan K-3 di tingkat dusun dan RT, memelihara semangat gotong royong di lingkungan desa, dan memberikan sumbangan kepada anak yatim piatu, lansia, dan korban bencana alam sebagai bentuk kepedulian sosial.

2. Pokja II: Pendidikan dan Keterampilan serta Pengembangan Kehidupan Berkoperasi

Pokja II menitikberatkan pada peningkatan sumber daya manusia dan ekonomi keluarga. Program Pendidikan dan Keterampilan meliputi pelatihan keterampilan praktis seperti kursus membuat kerajinan tangan (bunga dari sedotan/kain perca/plastik, boneka gantungan dari pita, hantaran pengantin) dan pembuatan makanan lokal (seperti emping melinjo). Pokja ini juga melakukan pendataan dan pencatatan kader serta mencari kader baru. Pembinaan kelompok BKB dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) juga menjadi fokus penting untuk meningkatkan pengetahuan ibu dalam perkembangan anak. Selain itu, pembinaan kelompok BKR dan BKL turut dilaksanakan, serta penyempurnaan dan penambahan Buku Kader Bina Keluarga Berencana Nasional (BKBN).

Untuk program Pengembangan Kehidupan Berkoperasi, Pokja II mengadakan penyuluhan mengenai manfaat koperasi, membina dan

mengembangkan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) di semua kelompok PKK Dusun dan RT agar memberikan manfaat nyata, terutama dalam hal permodalan. Penyuluhan juga dilakukan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembentukan serta peningkatan simpan pinjam pra-koperasi dan koperasi.

3. Pokja III: Pangan, Sandang, serta Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga

Pokja III berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar keluarga. Program Sandang mencakup penyuluhan berbusana untuk meningkatkan kesadaran cara berpakaian yang baik dan sopan, pembinaan keterampilan menjahit untuk memenuhi kebutuhan pakaian keluarga sekaligus meningkatkan pendapatan, menciptakan kesadaran cinta pakaian daerah dan nasional, serta meningkatkan kemampuan membuat kerajinan tekstil dan memasarkannya. Program Pangan dilaksanakan dengan mengadakan lomba cipta menu sehat dan bergizi, lomba menghias kue, penyuluhan Tabulapot (Tanaman Buah dalam Pot) dan Tabulakar (Tanaman Buah di Pekarangan), dan sosialisasi mutu bahan pangan asal hewan.

Pokja ini juga menyelenggarakan lomba tumpeng, memberikan penyuluhan tentang pemanfaatan pekarangan untuk keindahan, kesejukan, dan peningkatan perekonomian keluarga, serta menyebarkan informasi tentang keanekaragaman makanan nusantara non-beras. Poin utamanya adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi makanan yang beragam, bergizi, dan berimbang (3B). Terakhir, program Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga meliputi penyuluhan lingkungan pemukiman

dan K-3 (Kebersihan, Keindahan, Ketertiban), dengan fokus pada pengelolaan sampah menjadi pupuk kompos/organik. Pokja ini juga berupaya meningkatkan sarana air bersih, melaksanakan penyuluhan rumah sehat dan layak huni, serta meningkatkan pemanfaatan halaman dan pekarangan melalui program "Hatinyi PKK" (Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman PKK).

4. Pokja IV: Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup, dan Perencanaan Sehat

Pokja IV memiliki fokus pada kesehatan, pelestarian lingkungan, dan perencanaan masa depan keluarga. Program Kesehatan meliputi sosialisasi pentingnya olahraga, pemanfaatan Posyandu untuk peningkatan mutu dan cakupan layanan, penyuluhan Gizi Seimbang Ibu (GSI) di Posyandu untuk menurunkan angka kelahiran dan kematian bayi/ibu hamil, serta peningkatan imunisasi. Pokja ini juga memberikan penyuluhan dan pengembangan obat-obat tradisional (bekerja sama dengan Puskesmas), penyuluhan tentang kepedulian keluarga terhadap lansia, pembinaan keluarga sadar gizi (mengenal keanekaragaman makanan, pemeriksaan kesehatan, menggunakan garam beryodium, pentingnya ASI dan sarapan), pembinaan Posyandu, dan pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita dan lansia.

Program Kelestarian Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), pemanfaatan tanah kosong/pekarangan, penyuluhan tentang air bersih, penyegaran, dan penghijauan. Pokja ini juga memberikan pemahaman tentang pentingnya

lingkungan hidup yang sehat, bebas polusi, mencegah erosi, melestarikan lingkungan, dan yang paling penting, penyuluhan pemberantasan sarang nyamuk untuk mencegah Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan cara 3M (Menguras, Menutup, Mendaur Ulang). Terakhir, program Perencanaan Sehat mencakup penyuluhan tentang Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) dalam kegiatan Posyandu, penyuluhan gemar menabung untuk masa depan, penyuluhan KB mandiri, pelaksanaan penyuluhan tentang 8 Fungsi Keluarga, penyuluhan reproduksi KB di Usia Subur, penyuluhan pengelolaan keuangan keluarga dengan hidup hemat dan sederhana, serta pelaksanaan pendataan keluarga.

Secara keseluruhan, kegiatan PKK melalui 10 Program Pokoknya dan pembagian kerja per Pokja menunjukkan struktur yang terorganisir dan komprehensif, bertujuan untuk menjangkau setiap aspek kehidupan keluarga mulai dari nilai-nilai dasar, keterampilan, kebutuhan sandang-pangan-papan, hingga kesehatan, lingkungan, dan perencanaan masa depan (Fitrianti, 2025:318–322).

2.5 Partisipasi Sosial Perempuan

Partisipasi sosial perempuan didefinisikan sebagai keterlibatan aktif kaum perempuan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, yang mencakup bidang politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, budaya, dan lingkungan. Keterlibatan ini melampaui peran domestik tradisional dan menunjukkan upaya perempuan untuk mengkonstruksi identitas baru sebagai individu yang berkarir dan berkontribusi. Partisipasi ini merupakan indikator penting dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan (Adriani & Maulia, 2024:131-136).

Dalam ranah politik, partisipasi perempuan sangat krusial. Keaktifan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di berbagai level, mulai dari desa hingga nasional, menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat bersifat responsif gender, mengakomodasi kebutuhan, aspirasi, dan pengalaman perempuan. Upaya afirmasi, seperti kuota keterwakilan di lembaga legislatif, menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kontribusi nyata perempuan di bidang ini (Adriani & Maulia, 2024:131-136).

Partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi sering kali ditunjukkan melalui peran ganda, yaitu sebagai ibu rumah tangga sekaligus produsen atau pencari nafkah tambahan. Mereka aktif dalam Usaha Kecil dan Menengah (UKM), koperasi, dan berbagai kegiatan produktif lainnya. Keterlibatan ekonomi perempuan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan keluarga tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi komunitas dan negara secara keseluruhan. Dalam bidang kesehatan, perempuan memiliki andil besar, misalnya melalui kader Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) yang berperan aktif dalam pencegahan penyakit, peningkatan gizi ibu dan anak, serta sosialisasi kesehatan. Di sektor pendidikan, partisipasi perempuan sangat tinggi, baik sebagai pendidik maupun sebagai pihak yang mendorong peningkatan kesadaran pendidikan bagi anak-anak. Kualitas hidup masyarakat banyak ditentukan oleh partisipasi perempuan di kedua bidang ini (Indriastuti et al., 2023:98-110).

Di tingkat desa dan komunitas, partisipasi sosial perempuan terlihat nyata dalam kegiatan pembangunan. Mereka terlibat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), organisasi kemasyarakatan seperti PKK, dan

berbagai program pemberdayaan. Kontribusi mereka tidak hanya berupa tenaga dan pikiran, tetapi juga dalam bentuk swadaya dana dan keterampilan, yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap kemajuan lingkungannya. Meskipun partisipasi perempuan semakin meluas, mereka sering kali menghadapi tantangan berupa peran ganda. Beban domestik sebagai istri dan ibu sering kali menjadi kendala utama yang membatasi waktu dan kesempatan perempuan untuk terlibat secara maksimal dalam kegiatan publik dan pengambilan keputusan. Ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk berbagi tanggung jawab secara adil dalam rumah tangga (Purnomo et al., 2024:13752-13763).

Pemberdayaan perempuan menjadi usaha sistematis yang sangat penting. Pemberdayaan melibatkan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan dan keberdayaan perempuan, termasuk peningkatan kesadaran, pembangunan kapasitas (*capacity building*), dan pengawasan dalam proses pembuatan keputusan. Dengan demikian, perempuan memiliki bekal yang cukup untuk berpartisipasi lebih besar. Pemerintah memiliki peran vital dalam menjamin dan meningkatkan partisipasi sosial perempuan. Penerbitan undang-undang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan kebijakan afirmasi di berbagai bidang, termasuk politik, merupakan langkah konkret. Dukungan ini harus diperkuat dengan program-program yang memberikan akses, peran, kontrol, dan manfaat yang setara bagi perempuan dalam pembangunan (Purnomo et al., 2024:13752-13763).

Secara keseluruhan, partisipasi sosial perempuan bukan sekadar tuntutan keadilan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan sejahtera. Keterlibatan perempuan membawa perspektif yang lebih lengkap dan seimbang dalam pembangunan, menjamin non-

diskriminasi, serta memanfaatkan potensi sumber daya insani secara maksimal. Mengoptimalkan peran perempuan dalam partisipasi sosial adalah salah satu kunci bagi kemajuan bangsa (Yanti et al., 2025::119-133).

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan dapat digunakan sebagai perbandingan penelitian untuk peneliti yang memiliki penelitian yang serupa sehingga teori penelitian terdahulu yang digunakan dapat memunculkan teori- teori baru dalam menjawab masalah yang ada. Teori yang digunakan akan terus mengalami pembaharuan untuk menjadi pedoman dan referensi untuk peneliti selanjutnya. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu :

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Penulis, judul, tahun	Metode dan Teori	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	(Febrianti et al., 2022), Peran Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Meningkatkan Partisipasi Pemberdayaan Perempuan di Kota Malang	Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan teori yang digunakan adalah teori Soerjono Soekanto (2001 : 261) tentang peran merupakan aspek dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu.	Hasil penelitian menunjukkan terdapat 4 kelompok kerja sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan partisipasi pemberdayaan perempuan dan dukungan dari pemerintah. Adanya LSM dan organisasi perempuan lain yang membantu tercapainya pemberdayaan perempuan. Sarana dan prasarana yang memadai adapun anggaran program kerja yang ikut mendukung tercapainya pemberdayaan perempuan. Sarana dan prasarana yang memadai adapun anggaran program.	Terdapat persamaan adalah menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.	Terdapat perbedaan yaitu berfokus untuk mengetahui peran Tim Penggerak PKK dalam meningkatkan partisipasi pemberdayaan perempuan di Kota Malang. Teori yang digunakan tentang peran merupakan aspek dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu.

No.	Penulis, judul, tahun	Metode dan Teori	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
2.	(Ramadani, 2020), Upaya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Pemberdayaan Perempuan di Desa Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur.	Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan teori yang digunakan adalah teori Memungkinkan (<i>Enabling</i>), Memberayakan (<i>Empowering</i>), Mendukung (<i>Supporting</i>)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Mukti Jaya sudah terlaksana dengan cukup maksimal akan tetapi masih ditemui kendala-kendala dalam pelaksanaan pemberdayaannya bisa dilihat dari masih kurangnya antusias perempuan dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan kurangnya dana akibat dari lambatnya pencairan dana ADD.	Terdapat persamaan adalah menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.	Terdapat perbedaan fokus penelitian terdahulu yaitu berfokus untuk mendeskripsikan upaya PKK dalam pemberdayaan perempuan di Desa Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur. Teori yang digunakan adalah analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2013).
3.	(Santia et al., 2025) Pengaruh Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur	Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan teori yang digunakan adalah teori yang diungkapkan oleh Suharno dan Retnoningsih (2006: 243).	Hasil penelitian berdasarkan hasil angket atau kuesioner dan observasi penelitian ini, di mana pengaruh PKK Desa Kotaraja memiliki peran yang sangat baik dalam melaksanakan peran PKK dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya dalam semua aspek ekonomis sosial, pendidikan dan kesehatan yang memiliki tanggapan 90%.	Terdapat persamaan yaitu membahas program PKK di desa.	Terdapat perbedaan penelitian yaitu berfokus untuk mengetahui pengaruh program pemberdayaan keluarga (PKK) terhadap kesejahteraan anggotanya di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur.

No.	Penulis, judul, tahun	Metode dan Teori	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
4.	(Putri & Jatiningsih, 2020), Pelaksanaan Peran PKK Dalam Menggerakkan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Masyarakat Di Desa Kwadengan Barat Kecamatan Sidoarjo.	Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan teori yang digunakan adalah teori Peran Biddle dan Thomas yang menyatakan bahwa <i>expectation, norm, performance, and evaluation</i> saling berkaitan dalam perilaku peran.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, keempat perilaku dalam peran tersebut memperoleh hasil tidak sama. Artinya pelaksanaan peran PKK untuk menggerakkan partisipasi perempuan dalam pembangunan masyarakat telah berperan, karena pelaksanaan PKK di Kwadengan Barat sudah merencanakan program-program, kegiatan yang ingin dicapai sudah berjalan baik, anggota PKK sudah melaksanakan tugas dengan baik hanya saja partisipasi dari masyarakat perempuan kurang terlibat dalam agenda yang sudah dibuat.	Terdapat persamaan adalah Peran Pkk Dalam Menggerakkan Partisipasi Perempuan.	Terdapat perbedaan fokus penelitian terdahulu yaitu berfokus untuk mendeskripsikan pelaksanaan peran PKK dalam menggerakkan partisipasi perempuan dalam pembangunan masyarakat di Desa Kwadengan Barat Kecamatan Sidoarjo.
5.	(PUTRI AYU NANDA, 2024), Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Memberdayakan Perempuan Di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar	Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan teori yang digunakan adalah teori Peran menurut Janu Murdiyatmo dan Teori Pemberdayaan Perempuan menurut Mayoux yaitu: a. Kesejahteraan b. Akses c. Pengetahuan d. Partisipasi	Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian adalah peran PKK Kecamatan Luyo belum berjalan, dengan maksimal, pelaksanaannya belum memenuhi seluruh indikator pemberdayaan perempuan yakni kesejahteraan, akses, pengetahuan, partisipasi dan kontrol. Terutama keterlibatan dari perempuan yang belum berumah tangga belum dapat diakomodasi dengan program yang tepat.	Terdapat persamaan adalah menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.	Terdapat perbedaan yaitu PKK Kecamatan Luyo tidak memiliki banyak program terkait dengan pemberdayaan perempuan bahkan masih ada program yang belum terlaksana.

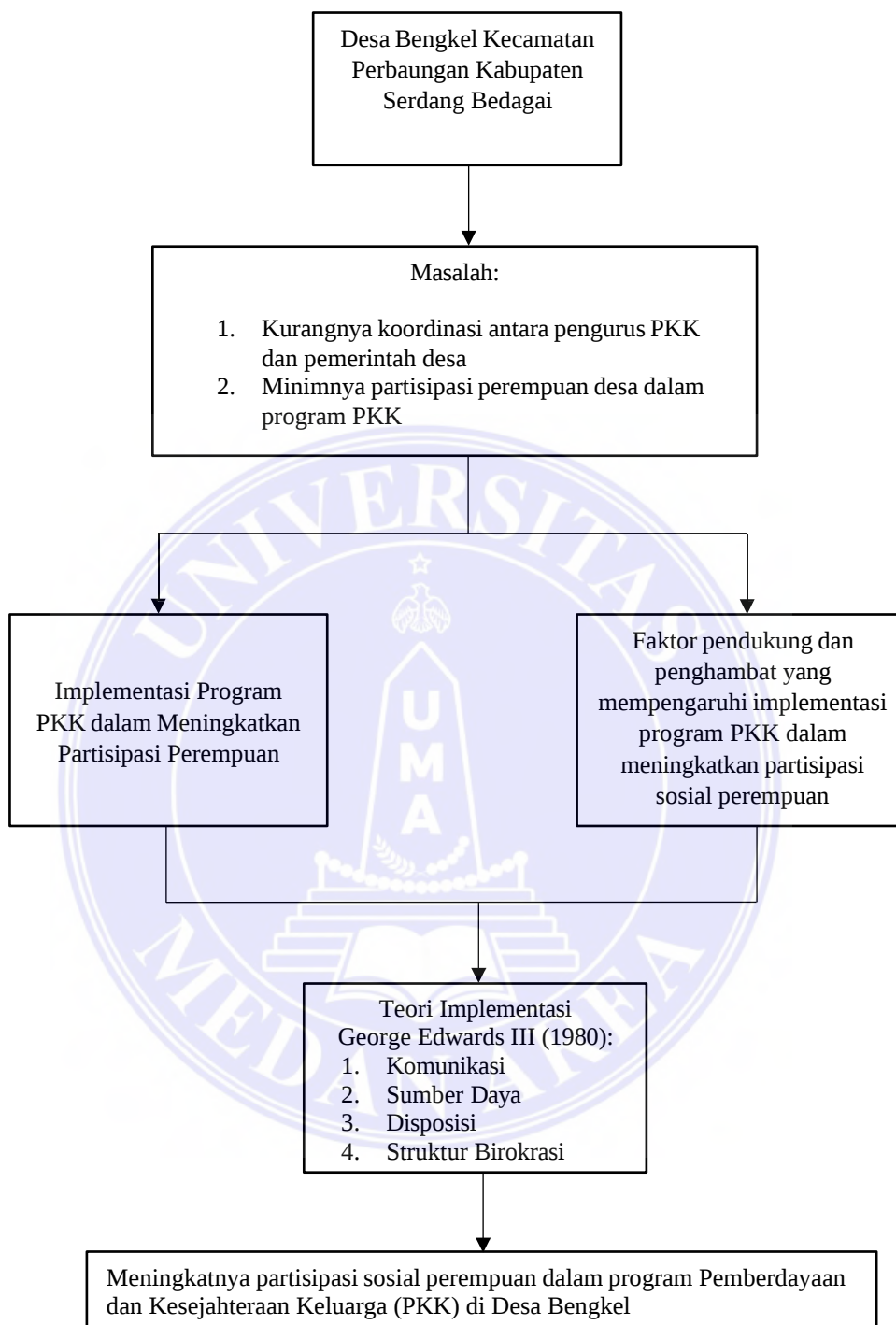
Sumber: Diolah peneliti, 2025.

2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah dasar peneliti yang menjadi landasan atau pedoman untuk menjelaskan alur penelitian yang mencakup penggabungan antara teori, fakta, observasi, serta kajian pustaka (Zulfikar, 2020:60). Kerangka berpikir ini bermaksud untuk mengetahui sejauh mana implementasi program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dalam meningkatkan partisipasi sosial perempuan di Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan. Peneliti menggunakan teori George C. Edward III dengan empat variabel dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. maka dari variabel tersebut akan meningkatkan pelayanan publik.

Adapun yang menjadi kerangka berfikir pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Berfikir



Sumber: Diolah peneliti, 2025.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan sebagai prosedur penelitian yang bersifat deskriptif, naratif dan menggunakan analisis terhadap sesuatu yang akan diteliti. Metode penelitian kualitatif berfokus pada penemuan yang mendalam mengenai fenomena-fenomena, isu, perspektif dalam subjek yang akan menjadi fokus peneliti, maka hasil yang diperoleh dari hasil penelitian yang menggunakan metode kualitatif berupa deskripsi kata-kata tertulis atau lisan dari informan. Penelitian kualitatif adalah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memahami fenomena berdasarkan perspektif individu atau kelompok, dengan cara menggali makna, pengalaman, dan interaksi sosial (Malahati et al., 2023:341-348).

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menekankan pada eksplorasi dan pemahaman makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian ini melibatkan proses investigasi yang mendalam terhadap suatu fenomena, dengan mengandalkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang diperoleh dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Data tersebut dikumpulkan melalui berbagai teknik seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen, untuk menggambarkan secara utuh konteks sosial yang diteliti (Malahati et al., 2023:341-348).

Metode kualitatif dipilih karena dianggap mampu mengungkap makna di balik suatu peristiwa atau fenomena yang belum banyak diketahui. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara komprehensif pengalaman,

pandangan, serta persepsi individu atau kelompok terhadap situasi yang mereka alami. Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada proses, interaksi, dan makna yang terkandung di dalamnya (Malahati et al., 2023:341-348).

Dalam konteks penelitian ini, metode kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam bagaimana implementasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam meningkatkan partisipasi sosial perempuan di Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami secara lebih luas dinamika sosial yang terjadi, faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program, serta persepsi dan pengalaman perempuan yang terlibat di dalamnya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran nyata tentang implementasi PKK dalam memperkuat partisipasi sosial perempuan serta kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga di tingkat desa.

Penelitian kualitatif juga memberikan ruang bagi peneliti untuk berinteraksi langsung dengan subjek penelitian, sehingga dapat membangun pemahaman yang mendalam dan autentik terhadap realitas sosial yang terjadi di lapangan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menangkap makna yang tersembunyi di balik perilaku, pandangan, serta pengalaman para informan, yang sering kali tidak dapat dijelaskan melalui angka atau data kuantitatif. Dalam konteks penelitian mengenai implementasi PKK, metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali sejauh mana program tersebut memberikan dampak terhadap peningkatan partisipasi sosial perempuan, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun kultural.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian berkaitan dengan masalah yang diangkat yaitu di Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan.

3.2.2 Waktu Penelitian

Tabel 2. Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Okt 2025	Nov 2025	Des 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mar 2026
1.	Penyusunan Proposal						
2.	Seminar Proposal						
3.	Perbaikan Proposal						
4.	Pelaksanaan Penelitian						
5.	Seminar Hasil						
6.	Revisi Skripsi						
7.	Sidang Meja Hijau						

Sumber: Diolah peneliti, 2025.

3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah individu yang dipilih untuk memberikan informasi terkait topik atau fenomena yang sedang diteliti, berdasarkan pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan mereka secara langsung. Menurut (Sugiyono, 2013:223), informan adalah sumber utama data dalam penelitian kualitatif, karena mereka dianggap memiliki pemahaman mendalam tentang situasi, peristiwa, atau konteks yang sedang diteliti. Informan dipilih secara *purposif*, artinya peneliti menetapkan kriteria tertentu untuk memastikan bahwa individu yang terlibat benar-benar relevan dengan tujuan penelitian.

Informan tidak hanya menjadi penyedia data, tetapi juga menjadi kunci dalam mengungkap makna di balik fenomena sosial atau budaya yang sedang dikaji, serta menekankan pentingnya hubungan antara peneliti dan informan, di mana keterbukaan dan kepercayaan menjadi fondasi utama dalam proses pengumpulan data. Peneliti perlu menciptakan suasana yang nyaman agar informan merasa bebas untuk berbagi pengalaman atau pandangan mereka tanpa tekanan. Dalam penelitian kualitatif, informan sering diwawancarai secara mendalam atau diamati dalam lingkungan alami mereka. Peran mereka sangat penting karena informasi yang mereka berikan akan membantu peneliti membangun pemahaman yang kaya dan mendalam tentang fenomena yang sedang dipelajari. Dengan kata lain, informan adalah jembatan antara peneliti dan realitas sosial yang ingin diungkapkan.

Pemilihan informan dalam penelitian ini adalah strategi yang digunakan agar dapat diperoleh data yang akurat dan mendalam mengenai implementasi program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dalam meningkatkan partisipasi sosial perempuan di Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Informan Kunci

Informan kunci dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki peran strategis dan pengetahuan mendalam mengenai pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Bengkel. Informan ini yaitu Kepala Desa Bengkel, Bapak Indra Fajar, SH., M.H., NL.P. Dipilih karena memiliki tanggung jawab langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan kegiatan PKK di tingkat desa.

Informan kunci diharapkan dapat memberikan informasi komprehensif mengenai tujuan program, strategi implementasi, kebijakan yang diterapkan, serta hasil yang telah dicapai dalam meningkatkan partisipasi sosial perempuan di masyarakat.

2. Informan Utama

Informan utama adalah individu yang terlibat secara aktif dalam pelaksanaan program PKK dan menjadi sasaran langsung dari kegiatan pemberdayaan. Informan ini terdiri atas Ketua tim penggerak PKK yaitu Ibu Ny. Witri Ningsih Indra Fajar dan ketua kelompok kerja (Pokja) PKK yaitu Ibu Yuni Tifa. Informan utama dipilih untuk menggambarkan secara nyata bagaimana implementasi program dilakukan di lapangan, bagaimana perempuan berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut, serta sejauh mana program PKK berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan partisipasi sosial mereka. Perspektif dari informan utama ini penting untuk melengkapi pandangan informan kunci mengenai hubungan kerja antara anggota PKK dan perangkat desa.

3. Informan Tambahan

Informan tambahan adalah individu atau kelompok yang memberikan informasi pendukung untuk memperkaya data penelitian, pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan program PKK, namun memiliki pandangan dan pengalaman yang relevan terhadap dampak program di masyarakat. Informan ini meliputi anggota aktif PKK yaitu Ibu Suriyani dan warga sekitar yaitu Ibu Supartik, yang dapat memberikan perspektif objektif mengenai perubahan sosial yang terjadi akibat

pelaksanaan program. Informan tambahan berperan untuk memperkuat validitas data dengan memberikan sudut pandang eksternal mengenai efektivitas program PKK dalam mendorong partisipasi sosial perempuan di Desa Bengkel.

Tabel 3. Informan Penelitian

No.	Informan	Uraian	Keterangan	Jumlah
1.	Kepala Desa Bengkel yaitu Bapak Indra Fajar, SH., M.H., NL.P	Dipilih karena memiliki tanggung jawab langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan kegiatan PKK di tingkat desa. Informan kunci diharapkan dapat memberikan informasi komprehensif mengenai tujuan program, strategi implementasi, kebijakan yang diterapkan, serta hasil yang telah dicapai dalam meningkatkan partisipasi sosial perempuan di masyarakat.	Informan Kunci	1 orang
2.	1. Ketua tim penggerak PKK yaitu Ibu Ny. Witri Ningsih Indra Fajar 2. Ketua kelompok kerja (Pokja) PKK yaitu Ibu Yuni Tifa	Mereka dipilih untuk menggambarkan secara nyata bagaimana implementasi program dilakukan di lapangan, bagaimana perempuan berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut, serta sejauh mana program PKK berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan partisipasi sosial mereka. Perspektif dari informan utama ini penting untuk melengkapi pandangan informan kunci mengenai hubungan kerja antara anggota PKK dan perangkat desa.	Informan Utama	2 orang
3.	1. Anggota aktif PKK yaitu Ibu Suriyani 2. Masyarakat yaitu Ibu Supartik	Mereka berperan untuk memperkuat validitas data dengan memberikan sudut pandang eksternal mengenai efektivitas program PKK dalam mendorong partisipasi sosial perempuan di Desa Bengkel.	Informan Tambahan	2 orang

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data dari sumber penelitian. Menurut (Sugiyono, 2013:224), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang akurat, sehingga tanpa mengetahui teknik pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Di dalam sebuah penelitian pengumpulan data merupakan tahapan yang sangat penting untuk dilakukan. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki integritas tinggi berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Teknik pengumpulan data yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif ada 3 macam, yakni observasi, wawancara, dokumentasi. Data yang diperoleh bisa berupa tulisan, foto, gambar, maupun dokumen penting dan resmi, namun bukan berupa angka-angka.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengambilan data yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data kualitatif yang melibatkan pengamatan langsung terhadap suatu fenomena dalam konteks aslinya. Data dikumpulkan melalui pencatatan yang sistematis, objektif, dan rasional terhadap perilaku, peristiwa, atau kondisi yang terjadi. Menurut (Sugiyono, 2013:226), observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang

lain. Melalui kegiatan observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati berbagai fenomena yang berkaitan dengan implementasi program PKK dalam meningkatkan partisipasi sosial perempuan di Desa bengkel, serta mencatat seluruh informasi yang berpengaruh terhadap objek penelitian. Observasi bertujuan untuk memperoleh data yang relevan sebagai dasar dalam proses analisis penelitian. Kegiatan observasi meliputi pengamatan terhadap pelaksanaan kegiatan – kegiatan PKK, tingkat keikutsertaan perempuan dalam berbagai program yang dijalankan serta berbagai aspek lain yang berperan penting dalam mendukung kelengkapan data penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian untuk menggali lebih dalam mengenai fenomena dan isu-isu yang ada. Wawancara merupakan komunikasi dua arah untuk memperoleh informasi dari Responden yang terkait. Menurut (Sugiyono, 2013:231), wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Dalam penelitian ini akan digunakan jenis wawancara terbuka yang di mana informan hadir dan menyaksikan proses wawancara sehingga mengetahui maksud dan tujuan wawancara ini.

Peneliti telah mempersiapkan pedoman wawancara dan melakukan wawancara dengan pihak – pihak yang terlibat yaitu Kepala Desa, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Pokja PKK, Anggota aktif PKK dan masyarakat. Wawancara dilakukan guna memperoleh informasi yang relevan terkait pelaksanaan program PKK serta mengetahui tingkat partisipasi perempuan.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah suatu proses sistematis dalam mengumpulkan data dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang relevan, seperti laporan penelitian sebelumnya, catatan sejarah, atau arsip-arsip yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh dari dokumentasi dapat berupa teks tertulis, angka, gambar, atau bentuk lainnya yang dapat memberikan informasi yang berharga untuk menjawab pertanyaan penelitian. Menurut (Sugiyono, 2013:240), dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan dan dokumentasi yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.

Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen – dokumen terkait. Dokumentasi bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat data hasil observasi dan wawancara. Data yang dikumpulkan meliputi data pengurus PKK, foto kegiatan PKK serta dokumen lain yang

relevan dengan penelitian. Melalui dokumentasi, peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan mendalam mengenai pelaksanaan program PKK dan tingkat partisipasi perempuan.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses pengolahan data menjadi informasi, dengan mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna sehingga data analisis yang diperoleh dapat mudah dipahami. Menurut (Sugiyono, 2013:243) analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat simpulan. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan setelah pengumpulan data berlangsung atau selesai pengumpulan data.

Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara berlanjut hingga tuntas, sehingga data yang diperoleh sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (2014:12-14). Terdapat tiga alur analisis data, secara detailnya sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses yang dilakukan peneliti untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan terkait implementasi Program PKK dalam meningkatkan partisipasi sosial perempuan di Desa Bengkel. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses menyederhanakan, memilih, dan memfokuskan data yang telah diperoleh dari lapangan. Dalam penelitian ini, dipilih informasi yang relevan dengan implementasi Program PKK dalam meningkatkan partisipasi sosial perempuan, serta membuang data yang tidak berkaitan. Proses ini bertujuan agar data lebih terarah dan memudahkan peneliti dalam memahami inti permasalahan yang diteliti.

3. Penyajian Data

Penyajian dalam teknik analisis data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tahap penyajian dalam analisis data kualitatif merupakan proses transformasi data mentah menjadi temuan yang terstruktur. Dalam penelitian ini, data mengenai pelaksanaan program PKK dan partisipasi perempuan disajikan secara deskriptif agar hubungan antar informasi terlihat jelas.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data, di mana peneliti merumuskan hasil penelitian berdasarkan data yang telah dianalisis. Kesimpulan yang diambil harus didukung oleh bukti-bukti yang valid dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, kesimpulan berfokus pada bagaimana implementasi Program PKK berjalan serta sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan partisipasi sosial perempuan di Desa Bengkel.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam meningkatkan partisipasi sosial perempuan di Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan dengan menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program PKK telah berjalan namun belum sepenuhnya optimal dalam mendorong partisipasi sosial perempuan secara merata, aktif, dan berkelanjutan. Indikator komunikasi menunjukkan bahwa implementasi Program PKK di Desa Bengkel telah didukung oleh mekanisme komunikasi yang berjalan melalui jalur formal dan informal. Namun demikian, kejelasan informasi terkait pembagian peran, tujuan jangka panjang program, dan bentuk keterlibatan anggota masih belum optimal. Indikator sumber daya menunjukkan bahwa implementasi Program PKK telah didukung oleh komitmen sumber daya manusia, pendanaan dari dana desa, iuran anggota, serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia. Meskipun demikian, keterbatasan jumlah pengurus dan kader PKK, variasi tingkat partisipasi anggota, keterbatasan anggaran, serta fasilitas yang belum sepenuhnya memadai menjadi kendala dalam optimalisasi pelaksanaan program. Indikator disposisi menunjukkan bahwa pengurus PKK di Desa Bengkel menunjukkan komitmen, kepedulian, dan tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan program. Tetapi keterbatasan jumlah pengurus yang harus merangkap beberapa peran, variasi

motivasi di kalangan perempuan yang belum aktif, serta belum optimalnya sistem penghargaan dan pendampingan menjadi tantangan dalam menjaga konsistensi dan keberlanjutan partisipasi sosial perempuan. Terakhir yaitu indikator struktur birokrasi, struktur organisasi PKK di Desa Bengkel telah mendukung pelaksanaan program secara relatif efisien, fleksibel, dan terkoordinasi, tetapi akses informasi bagi perempuan di luar struktur PKK masih terbatas, sehingga partisipasi sosial perempuan belum sepenuhnya merata.

2. Faktor pendukung Implementasi program PKK dalam meningkatkan partisipasi sosial perempuan di Desa Bengkel berkaitan dengan komitmen dan soliditas pengurus PKK yang menjadi penggerak utama dalam menjalankan program secara berkelanjutan, didukung oleh peran aktif pemerintah desa dan pemangku kepentingan melalui kebijakan, fasilitas, serta dukungan sosial. Selain itu, ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas memungkinkan pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Kesesuaian program dengan kebutuhan nyata perempuan juga menjadi faktor penting yang mendorong keterlibatan secara sukarela, sehingga perempuan tidak hanya menjadi peserta, tetapi juga berperan aktif dalam kegiatan pemberdayaan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Terdapat pula berbagai faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program PKK. Kurangnya koordinasi antara pengurus PKK dan pemerintah desa menyebabkan program yang dijalankan kurang selaras dengan kebijakan dan kebutuhan pembangunan desa, sehingga dukungan

yang diberikan belum optimal. Di sisi lain, minimnya partisipasi perempuan menjadi kendala utama, yang dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman, keterbatasan waktu, serta kurangnya motivasi dan kepercayaan diri untuk terlibat aktif. Kedua faktor ini saling berkaitan, di mana lemahnya koordinasi berdampak pada kualitas program, sementara program yang kurang optimal semakin menurunkan minat perempuan untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan koordinasi dan strategi pemberdayaan yang lebih efektif agar program PKK dapat berjalan optimal dan mampu meningkatkan partisipasi sosial perempuan secara berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam meningkatkan partisipasi sosial perempuan di Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program serta mengatasi berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.

1. Diperlukan upaya peningkatan kualitas komunikasi dan sosialisasi program PKK kepada seluruh perempuan di Desa Bengkel. Pengurus PKK bersama pemerintah desa perlu menyampaikan informasi program secara lebih jelas, konsisten, dan menjangkau seluruh lapisan perempuan, termasuk mereka yang belum tergabung secara aktif dalam keanggotaan PKK. Sosialisasi yang berkelanjutan, disertai penjelasan mengenai tujuan program, manfaat, serta peran yang dapat diambil oleh perempuan, diharapkan mampu mendorong peningkatan partisipasi sosial perempuan secara lebih luas dan merata.

2. Penguatan kapasitas sumber daya manusia PKK perlu menjadi perhatian utama, khususnya melalui pelatihan dan pengembangan kemampuan pengurus dan kader PKK. Pemerintah desa bersama pihak terkait diharapkan dapat menyelenggarakan pelatihan manajemen organisasi, kepemimpinan, serta keterampilan teknis yang relevan dengan kebutuhan perempuan. Upaya ini penting untuk mengurangi beban kerja pengurus yang merangkap beberapa peran serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program PKK di tingkat desa.
3. Pemerintah desa dan pengurus PKK diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan komitmen perempuan dalam berpartisipasi melalui pemberian apresiasi dan penghargaan terhadap keterlibatan aktif anggota. Bentuk apresiasi tidak selalu harus bersifat material, tetapi dapat berupa pengakuan sosial, sertifikat, atau kesempatan mengikuti pelatihan lanjutan. Pemberian penghargaan ini diharapkan mampu menjaga semangat dan konsistensi partisipasi perempuan dalam kegiatan PKK secara berkelanjutan.
4. Diperlukan penguatan mekanisme koordinasi dan struktur pelaksanaan Program PKK agar lebih efektif dan inklusif. Pengurus PKK perlu memperjelas pembagian tugas, meningkatkan koordinasi internal antar pokja, serta memperluas kerja sama dengan pihak eksternal seperti pemerintah desa, puskesmas, dan lembaga pendukung lainnya. Koordinasi yang baik akan membantu memperluas jangkauan program, meningkatkan kualitas kegiatan, serta memastikan bahwa seluruh perempuan di Desa Bengkel memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan PKK. Dengan penerapan saran-saran tersebut, diharapkan

implementasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Bengkel dapat berjalan lebih optimal, mampu meningkatkan partisipasi sosial perempuan secara aktif dan berkelanjutan, serta berkontribusi secara nyata terhadap pembangunan sosial dan kesejahteraan keluarga di tingkat desa.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Nugroho, R. (2023). *Public policy 7: Dinamika kebijakan publik, analisis kebijakan publik, manajemen politik kebijakan publik, etika kebijakan publik*. PT Elex Media Komputindo.
- Pasolong, H. (2019). *Teori administrasi publik*. Penerbit Alfabeta.
- Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. H. A. S. (2020). *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*. Nuansa Cendekia.
- Rodiyah, I., Choiriyah, I. U., & Sukmana, H. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Umsida Press, 1–237.
- Suaib, H., Rakia, A. S. R. S., Purnomo, A., & Ohorella, H. M. (2022). *Pengantar kebijakan publik*. Humanities Genius.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Suriani, R., Saputra, E., Sintha, M., Aprillina, I., Winarti, W., Apriani, G., Nasution, S., Simbolon, I. C., Suarjana, I. W., & Ginting, G. P. (2025). *Hukum Kebijakan Publik di Indonesia*. Star Digital Publishing.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan publik: Teori dan proses*. (No Title).

Skripsi, Tesis, Disertasi

- Arma, D. S. (2016). Evaluasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Program Pascasarjana*.
- Febrianti, F., Ati, N. U., & Sekarsari, R. W. (2022). Peran Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Meningkatkan Partisipasi Pemberdayaan Perempuan di Kota Malang. *Respon Publik*, 16(2), 6–13.
- Putri Ayu Nanda, P. A. Y. U. N. (2024). Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Memberdayakan Perempuan di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar. Universitas Sulawesi Barat.
- Utami, A. (2022). Implementasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Meningkatkan Pendidikan dan Keterampilan Perempuan di Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa. Universitas Medan Area.

Jurnal

- Adriani, S., & Maulia, S. T. (2024). Partisipasi perempuan dalam politik. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 4(2), 131–136.
- Damanik, A. R., Darma, S., Saragih, I. S., Syahputri, A., & Ginting, N. A. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Ibu-Ibu PKK Melalui Pelatihan Produksi Kerajinan Bordir Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Penggalangan Kabupaten Serdang Bedagai. *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(11), 4957–4963.
- Fitrianti, L. (2025). Peningkatan Pemahaman Ibu PKK Tentang Peran Strategis PKK Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera: dari 10 Program Pokok Ke Tindakan Nyata. *JGEN: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 318–322.
- Hanis, N. W., & Marzaman, A. (2020). Peran pemberdayaan kesejahteraan keluarga dalam pemberdayaan perempuan di Kecamatan Telaga. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(2), 123–135.
- Hasyim, F., & Makruf, S. A. (2022). Pemberdayaan Perempuan Melalui Gerakan Literasi Di Era Digital. *JUKESHUM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 46–52.
- Indriastuti, I., Hardaningtyas, D., & Ikmal, N. M. (2023). Peran Perempuan Dalam Pencapaian Sdgs Melalui Pembangunan Nasional. *Egalita Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, 18(2), 98–110.
- Malahati, F., Jannati, P., Qathrunnada, Q., & Shaleh, S. (2023). Kualitatif: Memahami karakteristik penelitian sebagai metodologi. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11(2), 341–348.
- Purnomo, M., Rahmaini, P., & Sari, T. M. (2024). Partisipasi Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi di Desa Sumber Jaya Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 13752–13763.
- Ramadani, D. M. (2020). Upaya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Pemberdayaan Perempuan di Desa Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(3), 677–690.
- Santia, S., Herlina, H., & Sa'di, K. (2025). Pengaruh Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur. *Transformasi: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Non Formal Informal*, 11(1), 68–75.
- Yanti, F., Ramadhani, M., Haq, F. N., & Pratiwi, D. T. (2025). Kesetaraan Gender sebagai Pilar Pembangunan Masyarakat: Tantangan, Strategi, dan Rekomendasi Kebijakan. *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, 19(2),

119–133.

Peraturan/Undang-Undang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).



PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian : Implementasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Meningkatkan Partisipasi Sosial Perempuan di Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan

Informan : Kunci, Utama, Tambahan

Informan Kunci

Nama Informan : Indra Fajar, SH., M.H., NL.P

Jabatan Informan : Kepala Desa Bengkel

Variabel	Indikator	Pertanyaan Wawancara
Komunikasi	Kejelasan	1. Bagaimana pemerintah desa menjelaskan tujuan PKK kepada masyarakat? 2. Apakah pernah terjadi miskomunikasi antara kepala desa dan PKK?
	Konsistensi	3. Apakah kebijakan untuk PKK selalu konsisten dari waktu ke waktu? 4. Bagaimana desa menjaga keselarasan antara visi desa dan PKK?
	Transmisi	5. Apakah ada forum rutin komunikasi dengan PKK? 6. Apakah terdapat kendala dalam proses penyampaian informasi program PKK kepada perempuan di Desa Bengkel?
Sumber Daya	Sumber Daya Manusia	7. Bagaimana dukungan SDM dari desa terhadap pelaksanaan PKK? 8. Bagaimana peran aparat desa dalam membantu kegiatan PKK?
	Sumber Daya Finansial	9. Bagaimana desa mengalokasikan dana untuk kegiatan PKK? 10. Apakah pernah terjadi kendala keuangan dalam mendukung PKK?
	Sarana-Prasarana	11. Bagaimana desa menyediakan fasilitas pendukung PKK dan bagaimana kondisi fasilitas tersebut?

		12. Bagaimana sarana-prasarana memadai untuk mendukung partisipasi perempuan?
Disposisi atau Sikap Pelaksana	Komitmen	13. Bagaimana bentuk komitmen pemerintah desa dalam mendukung pelaksanaan program PKK di Desa Bengkel? 14. Bagaimana langkah konkret yang diambil untuk memastikan program PKK berjalan secara berkelanjutan?
	Motivasi	15. Apa yang menjadi motivasi utama pemerintah desa dalam mendukung kegiatan PKK? 16. Bagaimana upaya untuk menjaga semangat dan motivasi pengurus PKK dalam melaksanakan program pemberdayaan perempuan?
	Orientasi	17. Bagaimana orientasi program PKK disesuaikan dengan visi pembangunan desa? 18. Apakah pelaksanaan program PKK sudah berorientasi pada peningkatan partisipasi sosial perempuan?
Struktur Birokrasi	Efisiensi	19. Bagaimana menilai efisiensi struktur organisasi PKK dalam melaksanakan program di lapangan? 20. Apakah sistem birokrasi yang ada saat ini sudah membantu mempercepat pencapaian tujuan program?
	Fleksibilitas	21. Apakah struktur organisasi PKK di desa ini cukup fleksibel dalam menghadapi perubahan kebijakan atau situasi darurat? 22. Sejauh mana PKK dapat menyesuaikan jadwal dan bentuk kegiatan dengan kebutuhan serta kondisi perempuan desa?
	Mekanisme Koordinasi	23. Bagaimana mekanisme koordinasi antara pemerintah desa dan Tim Penggerak PKK dalam pelaksanaan program? 24. Bagaimana proses koordinasi dalam menyelesaikan kendala atau permasalahan yang muncul selama pelaksanaan program PKK?

Informan Utama

Nama Informan : Ny. Witri Ningsih Indra Fajar dan Yuni Tifa

Jabatan informan : Ketua Tim Penggerak PKK Desa Bengkel dan Ketua kelompok kerja (Pokja) PKK

Variabel	Indikator	Pertanyaan Wawancara
Komunikasi	Kejelasan	1. Bagaimana menjelaskan tujuan utama program PKK kepada anggota PKK? 2. Apakah pernah terjadi kesalahpahaman antar anggota akibat kurang jelasnya komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan PKK?
	Konsistensi	3. Apakah arahan atau kebijakan dari pemerintah desa kepada PKK selalu konsisten dari waktu ke waktu? 4. Bagaimana cara menjaga agar pelaksanaan program PKK tetap berjalan sesuai tujuan awal tanpa banyak perubahan arah?
	Transmisi	5. Bagaimana mekanisme penyampaian informasi dari Ketua PKK kepada kelompok kerja dan anggota? 6. Apakah seluruh anggota dapat menerima informasi dengan jelas dan tepat waktu?
Sumber Daya	Sumber Daya Manusia	7. Apakah jumlah kader dan anggota yang terlibat dalam kegiatan PKK sudah mencukupi untuk melaksanakan program pemberdayaan perempuan? 8. Apakah kekurangan SDM pernah menjadi kendala?
	Sumber Daya Finansial	9. Dari mana sumber dana utama kegiatan PKK diperoleh dan apakah tersedia dukungan dana yang cukup untuk kegiatan PKK? 10. Apakah pernah mengalami kesulitan dalam pendanaan kegiatan?
	Sarana-Prasarana	11. Apakah fasilitas pendukung kegiatan PKK sudah memadai (tempat, alat, perlengkapan)? 12. Apakah keterbatasan sarana-prasarana pernah menghambat kegiatan PKK?

Disposisi atau Sikap Pelaksana	Komitmen	13. Bagaimana komitmen antara ketua dan anggota dalam menjalankan program PKK? 14. Apa tindakan yang dilakukan jika ada anggota yang kurang menunjukkan komitmen terhadap kegiatan PKK?
	Motivasi	15. Apa yang menjadi motivasi utama ketua dan anggota untuk aktif di PKK? 16. Bagaimana cara menumbuhkan motivasi anggota agar tetap berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial perempuan?
	Orientasi	17. Bagaimana program PKK diarahkan untuk meningkatkan partisipasi sosial perempuan di masyarakat? 18. Apakah orientasi kegiatan PKK sudah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perempuan di Desa Bengkel?
Struktur Birokrasi	Efisiensi	19. Apakah struktur organisasi PKK sudah berjalan dengan efisien dalam mendukung pelaksanaan program? 20. Apakah terdapat kendala terkait struktur birokrasi PKK yang memengaruhi efisiensi pelaksanaan program di Desa Bengkel?
	Fleksibilitas	21. Apakah struktur PKK cukup fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan atau situasi di lapangan? 22. Apakah anggota diberikan kebebasan untuk mengusulkan ide baru atau inovasi kegiatan?
	Mekanisme Koordinasi	23. Bagaimana mekanisme koordinasi antara PKK dan pemerintah desa dijalankan selama program berlangsung? 24. Seberapa sering dilakukan rapat koordinasi antar pengurus dan anggota?

Informan Tambahan

Nama Informan : Suriyani dan Supartik

Jabatan informan : Anggota aktif PKK dan masyarakat

Variabel	Indikator	Pertanyaan Wawancara
Komunikasi	Kejelasan	1. Apakah informasi tentang tujuan dan manfaat program PKK disampaikan dengan jelas? 2. Apakah implementasi program PKK dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan partisipasi sosial perempuan sudah baik?
	Konsistensi	3. Apakah pesan atau arahan yang diberikan oleh pengurus PKK selalu konsisten dari waktu ke waktu? 4. Pernahkah terjadi perbedaan penjelasan mengenai kegiatan PKK antara pengurus yang satu dengan yang lain?
	Transmisi	5. Bagaimana PKK menyampaikan informasi? apakah sudah efektif atau perlu ditingkatkan? 6. Apakah penyampaian informasi PKK sudah menjangkau seluruh perempuan di desa?
Sumber Daya	Sumber Daya Manusia	7. Apakah kader PKK memiliki kemampuan dan semangat yang baik dalam melaksanakan program? 8. Apakah jumlah kader PKK sudah mencukupi untuk melaksanakan program di desa?
	Sumber Daya Finansial	9. Apakah kegiatan PKK didukung dengan dana yang cukup dari pemerintah desa atau sumber lainnya? 10. Apakah masyarakat atau suami anggota PKK pernah ikut berpartisipasi dalam mendukung pendanaan kegiatan?
	Sarana-Prasarana	11. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang digunakan PKK dalam melaksanakan kegiatan di Desa Bengkel? 12. Apakah keterbatasan sarana pernah menghambat pelaksanaan kegiatan PKK?

Disposisi atau Sikap Pelaksana	Komitmen	13. Bagaimana keterlibatan anggota atau suami dalam mendukung kegiatan PKK di masyarakat? 14. Menurut masyarakat, apakah kader PKK benar-benar berperan aktif dalam meningkatkan partisipasi sosial perempuan di desa?
	Motivasi	15. Apakah kegiatan PKK memberikan manfaat nyata yang meningkatkan semangat perempuan untuk berpartisipasi sosial? 16. Apa yang menjadi dorongan utama untuk ikut aktif atau mendukung kegiatan PKK?
	Orientasi	17. Apakah orientasi kegiatan PKK sudah sesuai dengan kebutuhan perempuan di desa? 18. Menurut masyarakat, apakah program PKK mampu meningkatkan partisipasi sosial perempuan secara nyata?
Struktur Birokrasi	Efisiensi	19. Apakah kegiatan PKK dilaksanakan secara tertib dan tepat waktu? 20. Apakah prosedur pelaksanaan kegiatan PKK mudah dan tidak berbelit-belit?
	Fleksibilitas	21. Apakah PKK mampu menyesuaikan kegiatan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat Desa Bengkel? 22. Menurut masyarakat, apakah PKK cukup terbuka terhadap masukan dan usulan dari warga?
	Mekanisme Koordinasi	23. Apakah masyarakat dilibatkan dalam perencanaan atau pelaksanaan program PKK? 24. Bagaimana hubungan koordinasi antara pengurus PKK, anggota, dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan?

LAMPIRAN



Gambar 4. Wawancara Bersama Kepala Desa



Gambar 5. Wawancara Bersama Ketua Tim Penggerak PKK



Gambar 6. Wawancara Bersama Ketua Kelompok Kerja (Pokja) PKK



Gambar 7. Wawancara Bersama Anggota Aktif PKK



Gambar 8. Wawancara Bersama Masyarakat

SURAT PENGANTAR RISET DARI UNIVERSITAS MEDAN AREA



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 081/FIS.0/01.10/1/2025
Lampiran. : -
Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset
Medan, 12 Januari 2025

Kepada Yth.
Kepala Desa Bengkel
Di Tempat

Dengan hormat,
Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Rizka Chaira Fadhillah
NIM : 228520010
Program Studi : Administrasi Publik

Saat ini sedang membutuhkan beberapa data pada Kantor Kepala Desa Bengkel untuk menyelesaikan penelitian/riset yang berjudul :

" Implementasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Meningkatkan Partisipasi Sosial Perempuan di Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan "

Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dan pengambilan data yang diperlukan ini semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan skripsi. Sehubungan dengan ini, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data yang diminta pada bidang yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Diketahui,
Wakil Dekan Bidang Penjaminan Mutu Akademik
dan Pembelajaran


Dr. Fery Yumda Kurniaty, S.Sos, M.I.P

Ka. Prodi,


Dr. Drs. Indra Muda, M.AP

Tembusan:
1. Ka. Prodi Administrasi Publik
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip

SURAT SELESAI RISET DARI KANTOR DESA BENGKEL



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI KECAMATAN PERBAUNGAN DESA BENGKEL

Kode Pos : 20986

Nomor : 18.39.28/ 470 / 133 /2026

Lampiran : -

Perihal : Selesai Penelitian

Bengkkel, 09 Februari 2026

Kepada Yth,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

di-

Tempat

Dengan Hormat

Bersama ini Kami beritahukan kepada **UNIVERSITAS MEDAN AREA** bahwa mahasiswi dibawah ini :

Nama : RIZKA CHAIRA FADHILLAH

NIM : 228520010

Program Studi : Administrasi Publik

Universitas : Universitas Medan Area

Maka dengan ini kami jelaskan nama tersebut diatas telah selesai melakukan Pengumpulan Data (Riset) dengan judul **"Implementasi Program Pemberdayaan Dalam Meningkatkan Partisipasi Sosial Perempuan di Desa Bengkel Kecamatan perbaungan"**, Penelitian di mulai pada tanggal 12 Januari 2026 s/d 29 Januari 2026.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

